



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

# Realisasi Pelaksanaan APBNP 2016 (Sementara)

**“Menjaga APBN Sebagai Instrumen Kebijakan Yang Kredibel, Efektif dan Efisien serta Berkelanjutan (*Sustainable*)”**

**Konferensi Pers Pelaksanaan APBNP 2016**

**Jakarta, 3 Januari 2017**

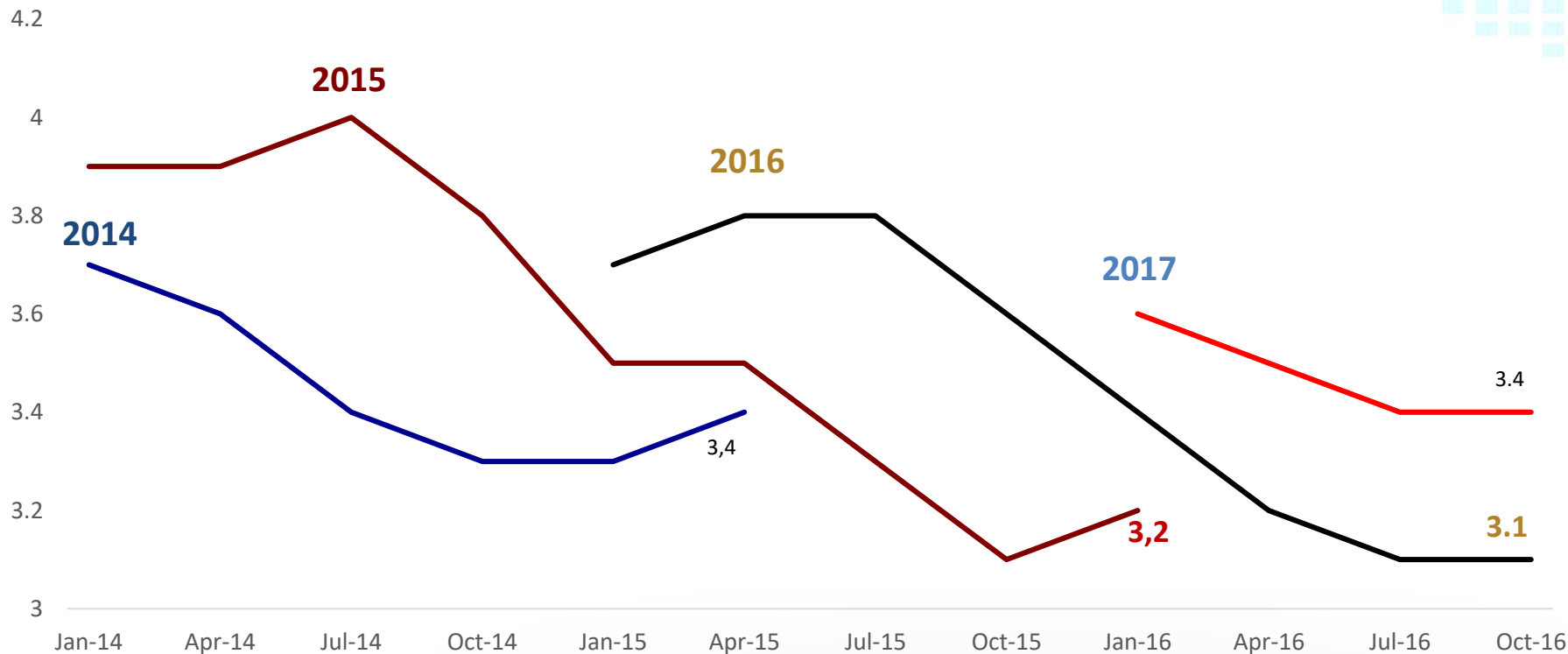




# Proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia terus mengalami koreksi lebih lemah. Kondisi ekonomi global belum sepenuhnya pulih dan masih penuh dengan ketidakpastian.



Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global (% , yoy)



Sumber: IMF, \*) realisasi

## Kondisi Perekonomian global 2016

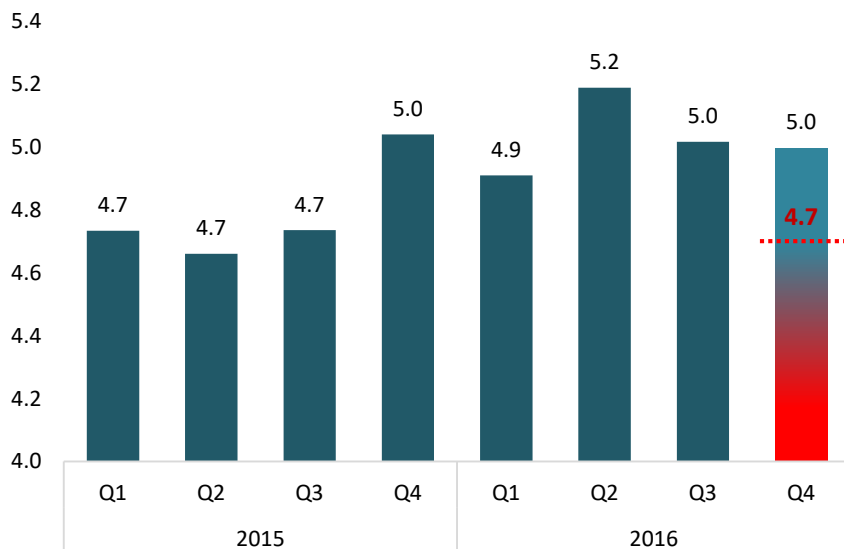
- Tingkat permintaan yang lemah & harga komoditas yang rendah
- Economic rebalancing Tiongkok
- Isu Geopolitik, e.g. Brexit
- Kenaikan suku bunga The FED & Pembalikan arus modal dari EMEs





# Pertumbuhan PDB Indonesia 2016 diperkirakan sebesar 5,0%

..konsumsi RT dan investasi diperkirakan tetap menjadi pendorong pertumbuhan...



- Proyeksi pertumbuhan ekonomi 2016 tetap 5,0 persen (dengan asumsi kuartal IV mencapai minimal 4,7 %).
- Konsumsi RT dan PMTB masih menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi.
- Konsumsi Pemerintah akan dipengaruhi belanja Pemerintah Pusat yang diperkirakan lebih rendah karena penyesuaian anggaran.
- Ekspor dan impor diperkirakan membaik meskipun masih tumbuh negatif.

|                  | 2015       |            |            |            | 2016       |            |            |            | 2015       | 2016       |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                  | Q1         | Q2         | Q3         | Q4         | Q1         | Q2         | Q3         | Q4         |            |            |
| Kons RT          | 4.7        | 4.7        | 5.0        | 5.0        | 5.0        | 5.1        | 5.0        | 5.1        | 4.8        | 5.0        |
| Kons Pemerintah  | 2.9        | 2.6        | 7.1        | 7.3        | 3.5        | 6.2        | -3.0       | -3.3       | 5.4        | 0.1        |
| PMTB             | 4.6        | 3.9        | 4.8        | 6.9        | 5.6        | 5.1        | 4.1        | 4.4        | 5.1        | 4.7        |
| Ekspor           | -0.6       | 0.0        | -0.6       | -6.4       | -3.5       | -2.4       | -6.0       | -2.9       | -2.0       | -3.7       |
| Impor            | -2.2       | -7.0       | -5.9       | -8.1       | -5.0       | -2.9       | -3.9       | -2.5       | -5.8       | -3.6       |
| <b>PDB (YoY)</b> | <b>4.7</b> | <b>4.7</b> | <b>4.7</b> | <b>5.0</b> | <b>4.9</b> | <b>5.2</b> | <b>5.0</b> | <b>5.0</b> | <b>4.8</b> | <b>5.0</b> |



# Seluruh sektor tumbuh positif pada Triwulan III-2016

Sektor industri pengolahan mampu tumbuh stabil, sementara sektor pertambangan mampu kembali tumbuh positif setelah 8 triwulan mengalami kontraksi pertumbuhan



| Pertumbuhan PDB per Sektor (% YoY)  | 2015       |            |            |               |            |            | 2016       |            |            |               |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
|                                     | Q1         | Q2         | Q3         | s.d. Q3 (ytd) | Q4         | Y          | Q1         | Q2         | Q3         | s.d. Q3 (ytd) |
| Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 4.0        | 6.9        | 3.3        | 4.7           | 1.6        | 4.0        | 1.8        | 3.4        | 2.8        | 2.7           |
| Pertambangan dan Penggalian         | -1.3       | -5.2       | -5.7       | -4.1          | -7.9       | -5.1       | -0.8       | -0.1       | 0.1        | -0.2          |
| Industri Pengolahan                 | 4.0        | 4.1        | 4.5        | 4.2           | 4.4        | 4.2        | 4.6        | 4.6        | 4.6        | 4.6           |
| Konstruksi                          | 6.0        | 5.4        | 6.8        | 6.1           | 8.2        | 6.6        | 7.9        | 6.2        | 5.7        | 6.6           |
| Perdagangan Besar dan Eceran        | 4.1        | 1.7        | 1.4        | 2.4           | 2.8        | 2.5        | 4.1        | 4.1        | 3.7        | 3.9           |
| Transportasi & Pergudangan          | 5.8        | 5.9        | 7.3        | 6.3           | 7.7        | 6.7        | 7.9        | 6.9        | 8.2        | 7.7           |
| Informasi dan Komunikasi            | 10.1       | 9.7        | 10.7       | 10.2          | 9.7        | 10.1       | 8.1        | 9.8        | 9.2        | 9.0           |
| Jasa Keuangan dan Asuransi          | 8.6        | 2.6        | 10.4       | 7.2           | 12.5       | 8.5        | 9.3        | 13.6       | 8.8        | 10.5          |
| Jasa-jasa lainnya                   | 5.1        | 6.5        | 5.0        | 5.6           | 5.9        | 5.6        | 6.0        | 5.4        | 4.3        | 5.2           |
| <b>PDB</b>                          | <b>4.7</b> | <b>4.7</b> | <b>4.7</b> | <b>4.7</b>    | <b>5.0</b> | <b>4.8</b> | <b>4.9</b> | <b>5.2</b> | <b>5.0</b> | <b>5.0</b>    |

\* Termasuk Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Sumber: BPS, Diolah

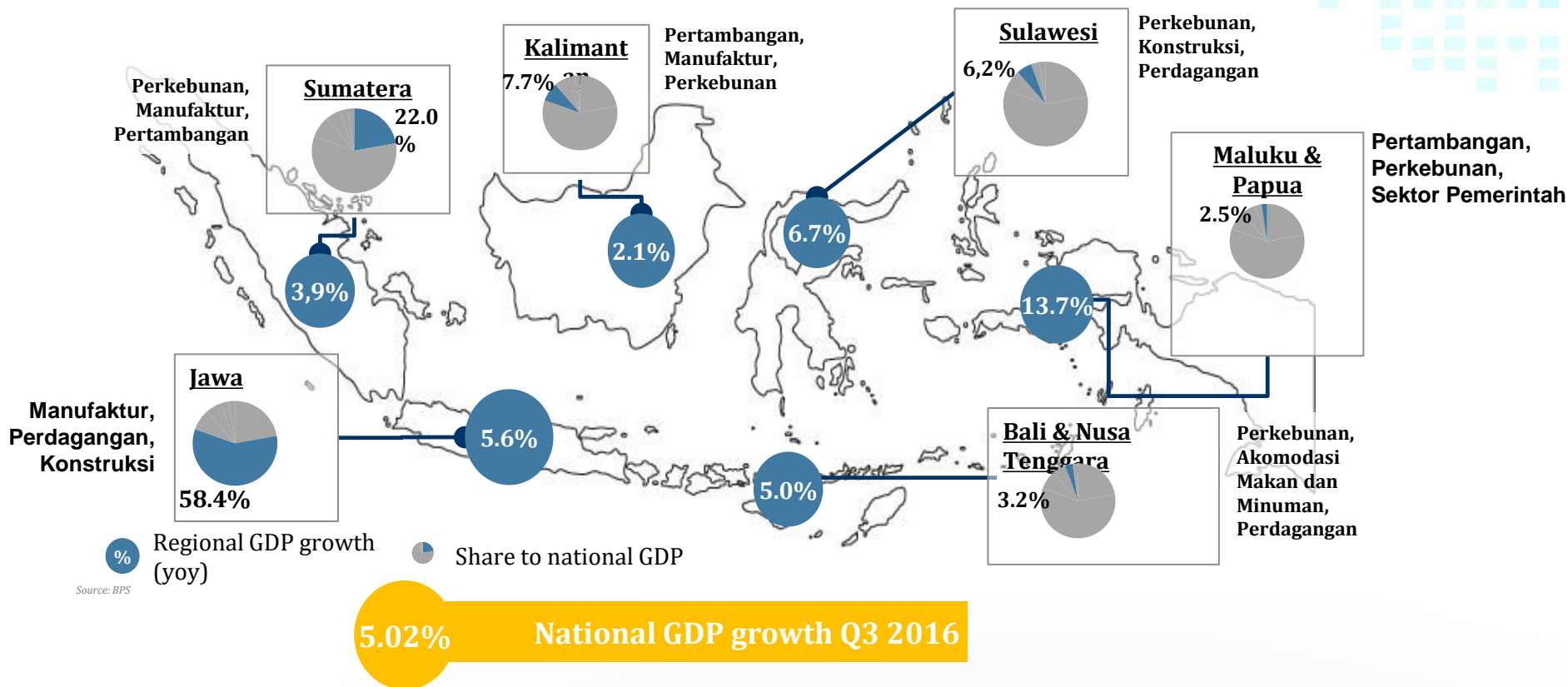
- Sektor industri pengolahan menunjukkan kinerja yang stabil, didukung oleh peningkatan investasi dan insentif dari paket kebijakan.
- Sektor jasa yang terkait dengan sistem logistik seperti sektor transportasi dan pergudangan serta sektor informasi dan komunikasi tumbuh dengan baik sejalan dengan realisasi pembangunan infrastruktur dan peningkatan efisiensi logistik nasional.
- Sektor pertambangan tumbuh positif didukung dengan peningkatan produksi migas.



# Kawasan Maluku-Papua tumbuh paling tinggi pada triwulan ke-III 2016



Jawa tumbuh stabil, sejalan dengan pertumbuhan sektor industri



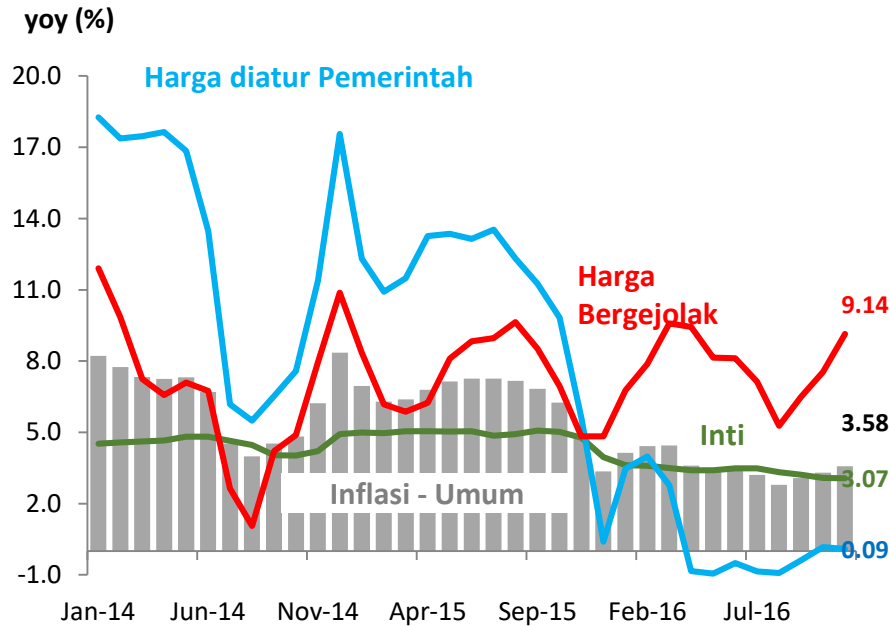
- Kawasan yang berbasis komoditas tambang menunjukkan pertumbuhan yang lebih tinggi dari Q3 2015: Maluku-Papua, Kalimantan dan Sumatera. (Pertumbuhan Q2 2016 YoY: Kalimantan 1.1%, Papua & Maluku - 1.6%)
- Jawa sebagai kontributor terbesar dan bertumpu pada sektor industri tumbuh stabil sebesar 5,6 persen
- Kawasan Sulawesi dan Bali Nusa Tenggara tumbuh sedikit lebih rendah dari periode sebelumnya



# Stabilitas harga dan nilai tukar terjaga

## Tingkat inflasi yang terjaga

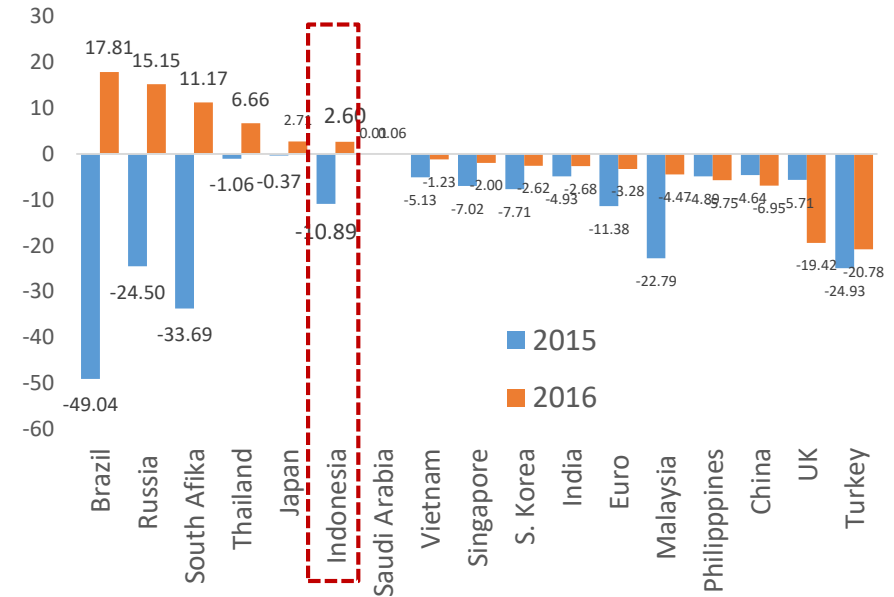
Sumber: BPS



- Tingkat inflasi tahun 2016 sangat terkendali didukung
  - ✓ Rendahnya harga komoditas serta
  - ✓ langkah pemerintah dalam menjaga produksi dan memperbaiki arus distribusi
- Faktor risiko:
  - ✓ Seasonal akhir tahun: liburan Natal, tahun baru, serta akhir tahun ajaran sekolah.
  - ✓ gangguan pasokan akibat faktor iklim.

## Perubahan Nilai mata uang terhadap dolar AS

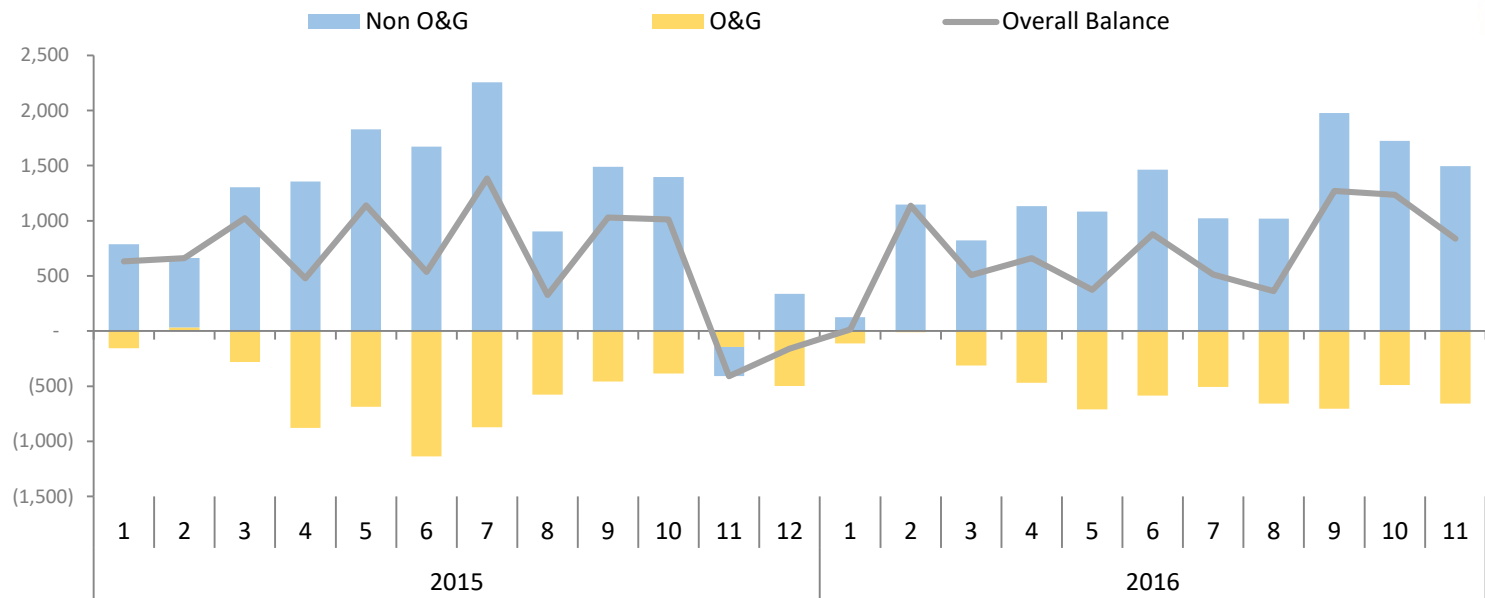
Sumber: Bloomberg



- Kinerja perekonomian domestik yang cukup baik di sepanjang tahun 2016 turut mendorong kinerja sektor keuangan.
- Berdasarkan nilai tengah kurs Bank Indonesia, rata-rata nilai tukar rupiah terhadap Dolar AS sepanjang tahun 2016 mencapai Rp13.307/USD **menguat** di-bandingkan rata-rata nilai tukar tahun sebelumnya yang mencapai 13.392/USD



# Neraca perdagangan masih membukukan surplus



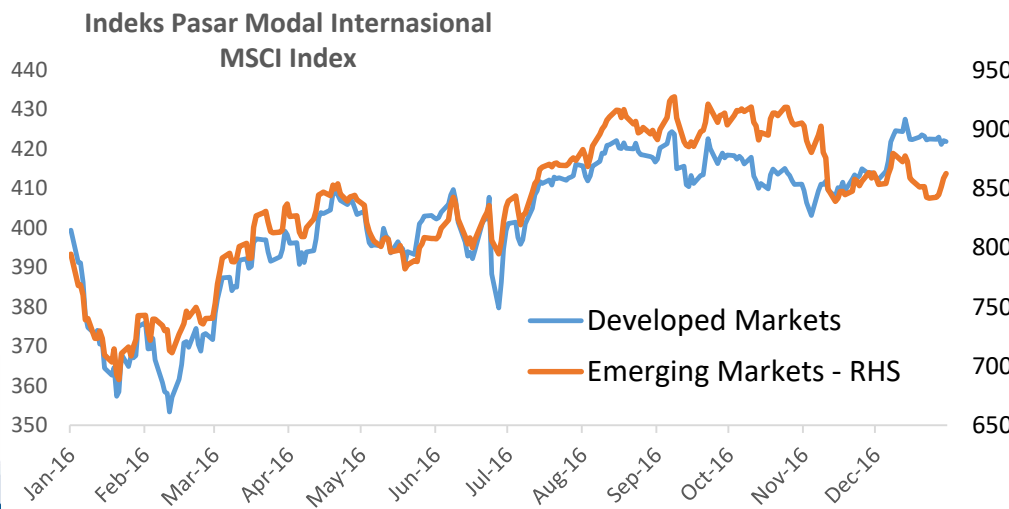
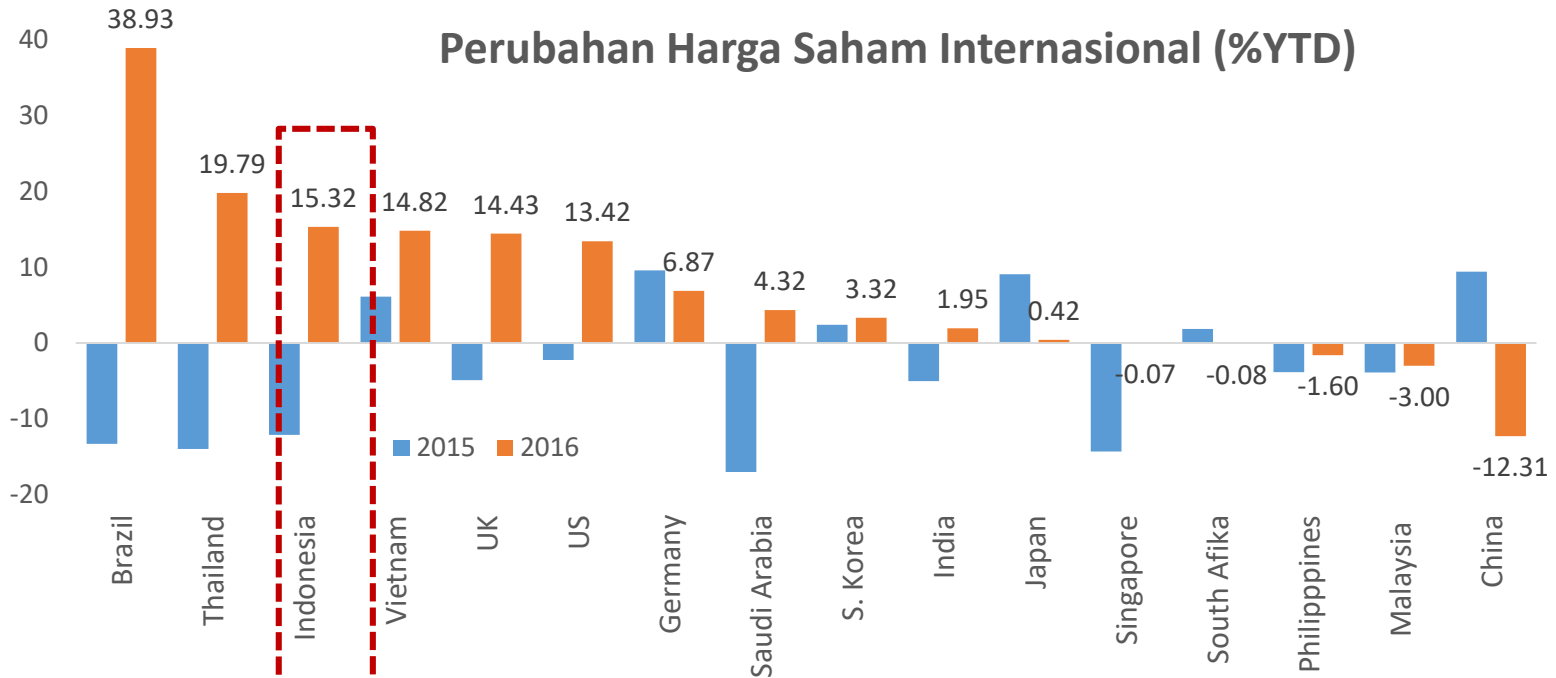
Sumber : BI

- Kinerja perdagangan internasional sejak semester kedua 2016 menunjukkan tanda-tanda perbaikan, khususnya pada neraca non migas.
- Secara kumulatif Januari-November 2016, tercatat surplus US\$ 7,79 miliar dengan nilai kumulatif ekspor dan impor masing-masing US\$ 130,65 miliar dan US\$ 122,85 miliar.



# Kinerja pasar modal Indonesia tahun 2016 termasuk yang cukup baik

...Indonesia berada pada peringkat terbaik kedua di Asia-Pasifik dan ke-5 Terbaik Dunia...



- Sejalan dengan penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, kinerja pasar saham juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015.
- Didukung oleh faktor-faktor:
  - ✓ Perbaikan perekonomian domestik.
  - ✓ Pemulihan kredibilitas APBN.
  - ✓ Pelaksanaan *Tax Amnesty* yang baik.





## Perekonomian masih tumbuh 5,0% meskipun ditengah ketidakpastian dan melemahnya perekonomian global



| Indikator   | 2015      | 2016   |                     |
|---|-----------|--------|---------------------|
|   | Realisasi | APBNP  | Realisasi Sementara |
| a. Pertumbuhan ekonomi (% , yoy)                          | 4,8       | 5,2    | 5,0                 |
| b. Inflasi (% , yoy)                                      | 3,4       | 4,0    | 3,1                 |
| c. Tingkat bunga SPN 3 bulan (%)                          | 6,0       | 5,5    | 5,7                 |
| d. Nilai tukar (Rp/US\$)                                  | 13.392    | 13.500 | 13.307              |
| e. Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/barel)             | 49        | 40     | 40                  |
| f. <i>Lifting</i> Minyak (ribu barel per hari)            | 778       | 820    | 829                 |
| g. <i>Lifting</i> Gas (ribu barel setara minyak per hari) | 1.195     | 1.150  | 1.184               |

Proyeksi PDB Nominal 2016: Rp12.521.249,2 Miliar



# Defisit APBNP 2016 terjaga pada level 2,46% thd PDB dan terdapat SiLPA sebesar Rp22,7 T.

| Uraian<br>(triliun rupiah)                        | 2015           |               | 2016           |                       |                     |              |                             |
|---|----------------|---------------|----------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------------------|
|   | LKPP Audited   | % thd APBNP   | APBNP          | Outlook (Penghematan) | Realisasi Sementara | % thd APBNP  | % thd Outlook (Penghematan) |
| <b>A. PENDAPATAN NEGARA</b>                       | <b>1.508,0</b> | <b>85,6</b>   | <b>1.786,2</b> | <b>1.582,9</b>        | <b>1.551,8</b>      | <b>86,9</b>  | <b>98,0</b>                 |
| <b>I. PENDAPATAN DALAM NEGERI</b>                 | <b>1.496,0</b> | <b>85,1</b>   | <b>1.784,2</b> | <b>1.580,9</b>        | <b>1.546,0</b>      | <b>86,6</b>  | <b>97,8</b>                 |
| 1. Penerimaan Perpajakan                          | 1.240,4        | 83,3          | 1.539,2        | 1.320,2               | 1.283,6             | 83,4         | 97,2                        |
| a. Penerimaan DJP (incl. PPh Migas)               | 1.060,8        | 82,0          | 1.355,2        | 1.139,2               | 1.104,9             | 81,5         | 97,0                        |
| b. Penerimaan DJBC                                | 179,6          | 92,1          | 184,0          | 181,0                 | 178,7               | 97,2         | 98,8                        |
| 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak                  | 255,6          | 95,0          | 245,1          | 260,7                 | 262,4               | 107,0        | 100,6                       |
| <b>II. PENERIMAAN HIBAH</b>                       | <b>12,0</b>    | <b>361,5</b>  | <b>2,0</b>     | <b>2,0</b>            | <b>5,8</b>          | <b>295,2</b> | <b>295,2</b>                |
| <b>B. BELANJA NEGARA</b>                          | <b>1.806,5</b> | <b>91,0</b>   | <b>2.082,9</b> | <b>1.898,6</b>        | <b>1.859,5</b>      | <b>89,3</b>  | <b>97,9</b>                 |
| <b>I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT</b>                | <b>1.183,3</b> | <b>89,7</b>   | <b>1.306,7</b> | <b>1.195,3</b>        | <b>1.148,6</b>      | <b>87,9</b>  | <b>96,1</b>                 |
| 1. Belanja K/L                                    | 732,1          | 92,0          | 767,8          | 672,0                 | 677,6               | 88,3         | 100,8                       |
| 2. Belanja non K/L                                | 451,2          | 86,1          | 538,9          | 523,3                 | 471,0               | 87,4         | 90,0                        |
| <b>II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA</b>       | <b>623,1</b>   | <b>93,8</b>   | <b>776,3</b>   | <b>703,3</b>          | <b>710,9</b>        | <b>91,6</b>  | <b>101,1</b>                |
| 1. Transfer ke Daerah                             | 602,4          | 93,6          | 729,3          | 659,1                 | 664,2               | 91,1         | 100,8                       |
| 2. Dana Desa                                      | 20,8           | 100,0         | 47,0           | 44,2                  | 46,7                | 99,4         | 105,7                       |
| <b>C. KESEIMBANGAN PRIMER</b>                     | <b>(142,5)</b> | <b>213,4</b>  | <b>(105,5)</b> | <b>(126,4)</b>        | <b>(124,9)</b>      | <b>118,4</b> | <b>98,8</b>                 |
| <b>D. SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A - B)</b>     | <b>(298,5)</b> | <b>134,2</b>  | <b>(296,7)</b> | <b>(315,7)</b>        | <b>(307,7)</b>      | <b>103,7</b> | <b>97,5</b>                 |
| <i>% Surplus/ (Defisit) Terhadap PDB</i>          |                |               | <b>(2,35)</b>  | <b>(2,50)</b>         | <b>(2,46)</b>       |              |                             |
| <b>E. PEMBIAYAAN ANGGARAN (I + II)</b>            | <b>323,1</b>   | <b>145,2</b>  | <b>296,7</b>   | <b>315,7</b>          | <b>330,3</b>        | <b>111,3</b> | <b>104,6</b>                |
| <b>I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI</b>                 | <b>307,9</b>   | <b>126,9</b>  | <b>299,3</b>   | <b>319,1</b>          | <b>344,9</b>        | <b>115,3</b> | <b>108,1</b>                |
| <b>II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto)</b>          | <b>15,3</b>    | <b>(76,2)</b> | <b>(2,5)</b>   | <b>(3,4)</b>          | <b>(14,6)</b>       | <b>-</b>     | <b>-</b>                    |
| <b>KELEBIHAN/(KEKURANGAN) PEMBIAYAAN ANGGARAN</b> | <b>24,6</b>    |               | <b>0,0</b>     | <b>(0,0)</b>          | <b>22,7</b>         |              |                             |

- 1) Defisit APBN terjaga pada tingkat yang aman.
- 2) Penerimaan pajak tumbuh 4,2% (walapun masih lebih rendah Rp33 triliun dari outlook sebelumnya sebesar Rp218 triliun).
- 3) *Tax Amnesty* menyumbang Rp107 Triliun.
- 4) Penerimaan Kepabeanan dan Cukai turun 0,5%.
- 5) Realisasi PNBPN lebih besar dari yang diperkirakan sebelumnya sebesar Rp17,3 triliun.
- 6) Penghematan belanja di luar yang ditetapkan dengan Inpres nomor 8 tahun 2016 bisa dilakukan.
- 7) Penundaan DAU sudah dibayarkan seluruhnya di akhir tahun 2016.



# Realisasi sementara penerimaan perpajakan mencapai Rp1.283,6 T (97,2% dari outlook penghematan) atau tumbuh 3,5% dari 2015



| Penerimaan Perpajakan<br>(triliun Rupiah) | 2015         |             | 2016    |                          |                        |             |                                |
|---|--------------|-------------|---------|--------------------------|------------------------|-------------|--------------------------------|
|   | LKPP Audited | % thd APBNP | APBNP   | Outlook<br>(Penghematan) | Realisasi<br>Sementara | % thd APBNP | % thd Outlook<br>(Penghematan) |
| <b>1. PPh Migas</b>                       | 49,7         | 100,3       | 36,3    | 33,4                     | 35,9                   | 98,8        | 107,5                          |
| <b>2. Pajak Non-Migas</b>                 | 1.011,2      | 81,2        | 1.318,9 | 1.105,8                  | 1.069,0                | 81,1        | 96,7                           |
| a. PPh Non-Migas                          | 552,6        | 87,7        | 819,5   | 664,4                    | 630,9                  | 77,0        | 95,0                           |
| b. Pajak pertambahan nilai                | 423,7        | 73,5        | 474,2   | 416,3                    | 410,5                  | 86,6        | 98,6                           |
| c. Pajak bumi dan bangunan                | 29,3         | 109,6       | 17,7    | 17,7                     | 19,4                   | 109,8       | 109,8                          |
| d. Pajak lainnya                          | 5,6          | 47,5        | 7,4     | 7,4                      | 8,2                    | 110,1       | 110,1                          |
| <b>3. Bea dan Cukai</b>                   | 179,6        | 92,1        | 184,0   | 181,0                    | 178,7                  | 97,2        | 98,8                           |
| a. Cukai                                  | 144,6        | 99,2        | 148,1   | 146,1                    | 143,5                  | 96,9        | 98,2                           |
| b. Bea masuk                              | 31,2         | 83,9        | 33,4    | 32,4                     | 32,2                   | 96,5        | 99,5                           |
| c. Bea Keluar                             | 3,7          | 30,9        | 2,5     | 2,5                      | 3,0                    | 119,9       | 119,9                          |
| <b>TOTAL</b>                              | 1.240,4      | 83,3        | 1.539,2 | 1.320,2                  | 1.283,6                | 83,4        | 97,2                           |

- Penerimaan Pajak Non Migas tumbuh 5,7% dibandingkan dengan realisasinya pada 2015.
- Apabila tidak termasuk *Tax Amnesty* sebesar Rp107 triliun, pertumbuhan penerimaan pajak non migas negatif 4,9%:
  - ✓ Masih lemahnya perekonomian dan harga komoditi;
  - ✓ Pemberian insentif perpajakan a.l. perubahan PTKP;
  - ✓ Reformasi perpajakan menjadi sangat penting.
- Penerimaan Bea dan Cukai secara nominal menurun dari 2015 namun persentasi capaian naik 5,5% dibanding capaian tahun 2015:
- Cukai turun seiring produksi rokok 2016 yang stagnan
- Pentingnya memerangi rokok ilegal
- Bea masuk sedikit membaik di akhir tahun (siklus akhir tahun dan *extra effort*).



# PNBP mencapai Rp262,4 T (Rp17,3 T di atas target APBNP)



| PNBP<br>(triliun rupiah)              | 2015         |             | 2016  |                          |                     |             |                                |
|---------------------------------------|--------------|-------------|-------|--------------------------|---------------------|-------------|--------------------------------|
|                                       | LKPP Audited | % thd APBNP | APBNP | Outlook<br>(Penghematan) | Realisasi Sementara | % thd APBNP | % thd Outlook<br>(Penghematan) |
| <b>a. Penerimaan SDA</b>              | 101,0        | 84,9        | 90,5  | 83,1                     | 65,5                | 72,3        | 78,8                           |
| 1) SDA Migas                          | 78,2         | 96,1        | 68,7  | 61,3                     | 44,9                | 65,4        | 73,2                           |
| 2) Non Migas                          | 22,8         | 60,7        | 21,8  | 21,8                     | 20,6                | 94,2        | 94,2                           |
| - Pertambangan Minerba                | 17,7         | 55,8        | 16,5  | 16,5                     | 15,5                | 93,8        | 93,8                           |
| - Panas Bumi                          | 0,9          | 151,2       | 0,6   | 0,6                      | 0,9                 | 147,9       | 147,9                          |
| - Kehutanan                           | 4,2          | 88,2        | 4,0   | 4,0                      | 3,8                 | 94,8        | 94,8                           |
| - Perikanan                           | 0,1          | 13,7        | 0,7   | 0,7                      | 0,4                 | 52,2        | 52,2                           |
| <b>b. Pendapatan Bagian Laba BUMN</b> | 37,6         | 101,9       | 34,2  | 34,2                     | 37,1                | 108,7       | 108,7                          |
| <b>c. PNBP Lainnya</b>                | 81,7         | 90,7        | 84,1  | 107,1                    | 117,3               | 139,5       | 109,5                          |
| <b>d. Pendapatan BLU</b>              | 35,3         | 152,9       | 36,3  | 36,3                     | 42,4                | 117,0       | 117,0                          |
| <b>TOTAL</b>                          | 255,6        | 95,0        | 245,1 | 260,7                    | 262,4               | 107,0       | 100,6                          |

- Pencapaian PNBP didukung oleh:
  - ✓ Realisasi lifting minyak dan gas yang melampaui target.
  - ✓ Peningkatan peran dividen BUMN.
  - ✓ Kinerja PNBP K/L yang lebih baik.
  - ✓ Peningkatan PNBP BLU.
- Walaupun cost recovery migas melampaui target yang direncanakan (US\$8 miliar → US\$11,9 miliar)



# Kebijakan penghematan belanja K/L dapat berjalan efektif dengan tetap menjaga kualitas belanja.



| Belanja Pemerintah Pusat<br>(triliun rupiah) | 2015           |             | 2016           |                       |                     |             |                             |
|--|----------------|-------------|----------------|-----------------------|---------------------|-------------|-----------------------------|
|  | LKPP Audited   | % thd APBN  | APBN           | Outlook (Penghematan) | Realisasi Sementara | % thd APBN  | % thd Outlook (Penghematan) |
| <b>A. K/L</b>                                | <b>732,1</b>   | <b>92,0</b> | <b>767,8</b>   | <b>672,0</b>          | <b>677,6</b>        | <b>88,3</b> | <b>100,8</b>                |
| <b>B. Belanja Non K/L</b>                    | <b>451,2</b>   | <b>86,1</b> | <b>538,9</b>   | <b>523,3</b>          | <b>471,0</b>        | <b>87,4</b> | <b>90,0</b>                 |
| a.l. a. Pembayaran Bunga Utang               | 156,0          | 100,2       | 191,2          | 189,2                 | 182,8               | 95,6        | 96,6                        |
| b. Subsidi                                   | 186,0          | 87,7        | 177,8          | 176,9                 | 174,6               | 98,2        | 98,7                        |
| i. Subsidi Energi                            | 119,1          | 86,4        | 94,4           | 93,5                  | 106,8               | 113,2       | 114,3                       |
| ii. Subsidi Non Energi                       | 66,9           | 90,0        | 83,4           | 83,4                  | 67,7                | 81,2        | 81,2                        |
| c. Belanja Lain-Lain                         | 10,1           | 31,7        | 22,5           | 12,8                  | 6,9                 | 30,5        | 53,7                        |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>1.183,3</b> | <b>89,7</b> | <b>1.306,7</b> | <b>1.195,3</b>        | <b>1.148,6</b>      | <b>87,9</b> | <b>96,1</b>                 |

- K/L mampu membelanjakan 100,8% sesuai pagu penghematan.
- Daya serap anggaran membaik sesuai dengan perbaikan persiapan pelaksanaan anggaran pada awal tahun.
- Subsidi dan bantuan sosial lebih tepat sasaran.
- Subsidi Energi mencapai 13,2% di atas rencananya, sebagai dampak penundaan penyesuaian tarif listrik.
- Penghematan bunga utang akibat perbaikan nilai tukar dan perbaikan kredibilitas APBN.

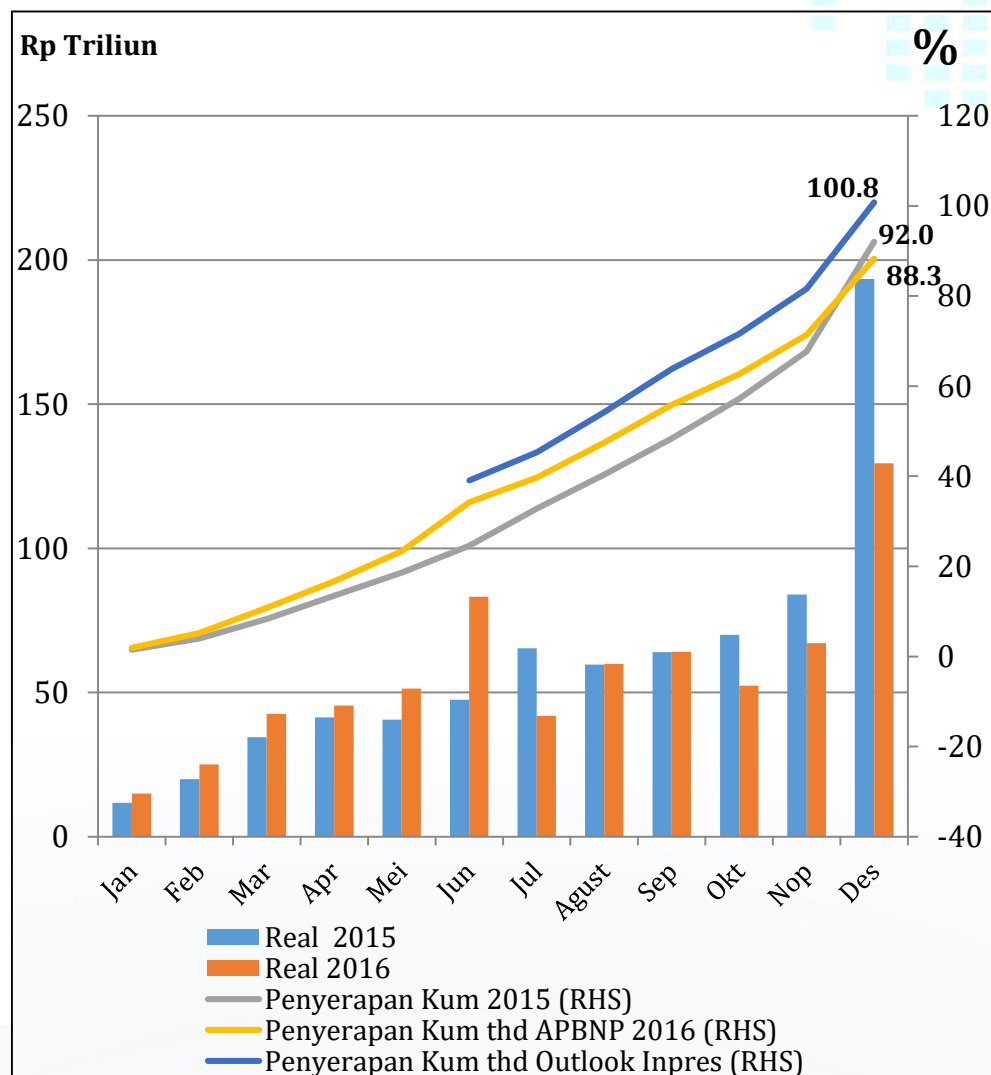
"Besaran *outlook* Inpres Belanja KL memperhitungkan penghematan Inpres Rp64,7 triliun dan estimasi alokasi tidak terserap (penghematan) alamiah sekitar Rp31 triliun"



## Peningkatan kualitas belanja KL dilakukan melalui percepatan pelaksanaan anggaran dan pelaksanaan berbagai program prioritas

Peningkatan kualitas belanja terus dilakukan, antara lain melalui:

- ✓ Tetap mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas seperti, pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
- ✓ Percepatan pelaksanaan kegiatan K/L melalui pelelangan dini berjalan efektif, tercermin dari peningkatan penyerapan di awal tahun dibandingkan periode sebelumnya.
- ✓ Monitoring dan evaluasi pelaksanaan belanja pemerintah yang intensif, baik di pusat maupun di daerah dalam tahun 2016.



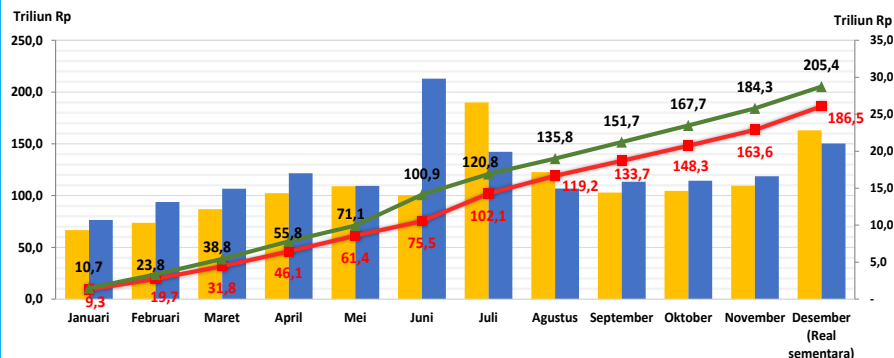
"Besaran outlook Inpres Belanja KL memperhitungkan penghematan Inpres Rp64,7 triliun dan estimasi alokasi tidak terserap (penghematan) alamiah sekitar Rp31 triliun“.



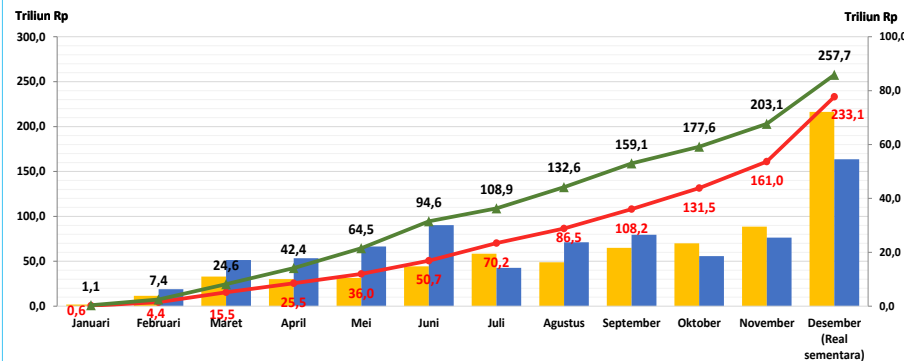
# Realisasi Sementara Belanja K/L menurut Jenis Tahun 2015-2016



### Belanja Pegawai



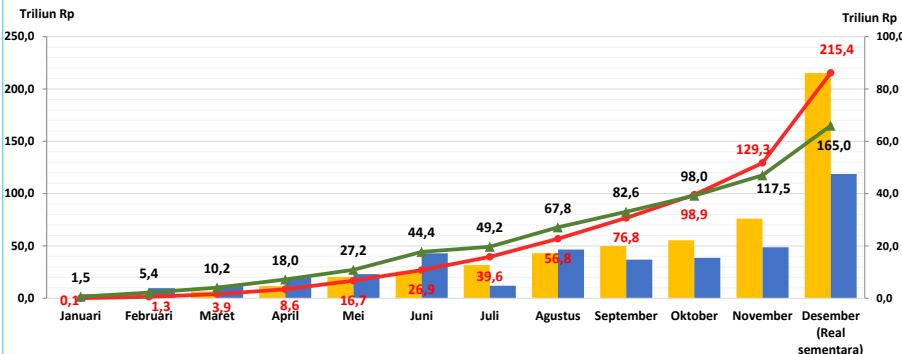
### Belanja Barang



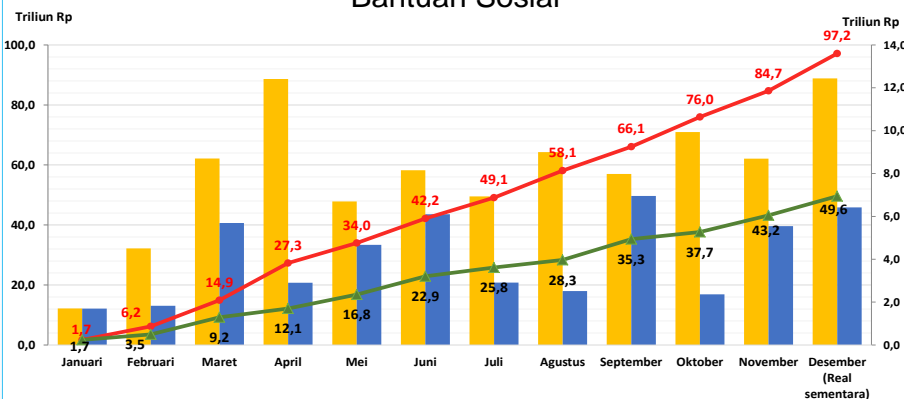
Tidak termasuk Belanja Pegawai Non-K/L (a.l pensiun, jaminan kesehatan, JKK, dan JKM) sebesar Rp99,5 T di realisasi s.d 31 Desember 2016

■ 2015 (bulanan) (RHS)      ■ 2016 (bulanan) (RHS)  
—■— 2015 (akumulasi) (LHS)      —▲— 2016 (akumulasi) (LHS)

### Belanja Modal



### Bantuan Sosial



Triliun Rupiah

| Uraian        | 2015         |              |             | 2016         |                |             |
|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------|----------------|-------------|
|               | APBNP        | LKPP         | % thd APBNP | APBNP        | Real Sementara | % thd APBNP |
| Bel. Pegawai  | 183,7        | 186,5        | 101,5       | 209,0        | 205,4          | 98,3        |
| Bel. Barang   | 259,4        | 233,1        | 89,9        | 302,8        | 257,7          | 85,1        |
| Bel. Modal    | 252,8        | 215,4        | 85,2        | 206,6        | 165,0          | 79,9        |
| Bansos        | 99,6         | 97,2         | 97,6        | 49,4         | 49,6           | 100,4       |
| <b>Jumlah</b> | <b>795,5</b> | <b>732,1</b> | <b>92,0</b> | <b>767,8</b> | <b>677,6</b>   | <b>88,3</b> |



# Subsidi : Kebijakan subsidi diarahkan agar lebih tepat sasaran.



| Subsidi<br>(triliun rupiah)  | 2015         |             | 2016         |                          |                        |              |                                |
|------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------------------|------------------------|--------------|--------------------------------|
|                              | LKPP Audited | % thd APBNP | APBNP        | Outlook<br>(Penghematan) | Realisasi<br>Sementara | % thd APBNP  | % thd Outlook<br>(Penghematan) |
| <b>a Subsidi Energi</b>      | <b>119,1</b> | <b>86,4</b> | <b>94,4</b>  | <b>93,5</b>              | <b>106,8</b>           | <b>113,2</b> | <b>114,3</b>                   |
| 1) Subsidi BBM, LPG & BBN    | 60,8         | 93,9        | 43,7         | 43,1                     | 43,7                   | 100,0        | 101,5                          |
| 2) Subsidi Listrik           | 58,3         | 79,7        | 50,7         | 50,4                     | 63,1                   | 124,6        | 125,3                          |
| <b>b Subsidi Non Energi</b>  | <b>66,9</b>  | <b>90,0</b> | <b>83,4</b>  | <b>83,4</b>              | <b>67,7</b>            | <b>81,2</b>  | <b>81,2</b>                    |
| 1) Subsidi Pangan            | 21,8         | 115,3       | 22,5         | 22,5                     | 22,1                   | 98,1         | 98,1                           |
| 2) Subsidi Pupuk             | 31,3         | 79,3        | 30,1         | 30,1                     | 26,9                   | 89,3         | 89,3                           |
| 3) Subsidi Benih             | 0,1          | 11,9        | 1,0          | 1,0                      | 0,4                    | 40,9         | 40,9                           |
| 4) PSO                       | 3,3          | 100,0       | 3,8          | 3,8                      | 3,7                    | 96,6         | 96,6                           |
| 5) Kredit Program            | 1,9          | 75,8        | 15,8         | 15,8                     | 5,4                    | 34,2         | 34,2                           |
| 6) Subsidi Pajak / Pajak DTP | 8,5          | 92,2        | 10,2         | 10,2                     | 9,3                    | 91,1         | 91,1                           |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>186,0</b> | <b>87,7</b> | <b>177,8</b> | <b>176,9</b>             | <b>174,6</b>           | <b>98,2</b>  | <b>98,7</b>                    |

- Subsidi listrik lebih tinggi dari pagunya karena penundaan kebijakan kenaikan tarif untuk golongan 900 watt.
- Realisasi subsidi bunga kredit program belum optimal karena ada beberapa subsidi yang baru dilaksanakan tahun 2016, seperti subsidi bunga KUR, subsidi bunga kredit perumahan, dan subsidi bantuan uang muka perumahan.





# Peran Transfer ke Daerah dan Dana Desa meningkat, menunjukkan komitmen Pemerintah terhadap desentralisasi fiskal.



| Transfer ke Daerah dan Dana Desa<br>(triliun rupiah) | 2015         |              | 2016         |                       |                     |             |                             |
|--|--------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------------|-------------|-----------------------------|
|  | LKPP Audited | % thd APBN   | APBN         | Outlook (Penghematan) | Realisasi Sementara | % thd APBN  | % thd Outlook (Penghematan) |
| <b>1. Transfer ke Daerah</b>                         | <b>602,4</b> | <b>93,6</b>  | <b>729,3</b> | <b>659,1</b>          | <b>664,2</b>        | <b>91,1</b> | <b>100,8</b>                |
| a. Dana Perimbangan                                  | 583,0        | 93,4         | 705,5        | 635,3                 | 640,4               | 90,8        | 100,8                       |
| 1) Dana Transfer Umum                                | 430,9        | 93,1         | 494,4        | 454,1                 | 475,9               | 96,3        | 104,8                       |
| a) Dana Bagi Hasil                                   | 78,1         | 70,9         | 109,1        | 88,1                  | 90,5                | 83,0        | 102,7                       |
| b) Dana Alokasi Umum                                 | 352,9        | 100,0        | 385,4        | 365,9                 | 385,4               | 100,0       | 105,3                       |
| 2) Dana Transfer Khusus                              | 152,1        | 94,1         | 211,0        | 181,2                 | 164,5               | 77,9        | 90,7                        |
| b. Dana Insentif Daerah                              | 1,7          | 100,0        | 5,0          | 5,0                   | 5,0                 | 100,0       | 100,0                       |
| c. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan D.I.Y.  | 17,7         | 100,0        | 18,8         | 18,8                  | 18,8                | 100,0       | 100,0                       |
| <b>2. Dana Desa</b>                                  | <b>20,8</b>  | <b>100,0</b> | <b>47,0</b>  | <b>44,2</b>           | <b>46,7</b>         | <b>99,4</b> | <b>105,7</b>                |
| <b>TOTAL</b>   | <b>623,1</b> | <b>93,8</b>  | <b>776,3</b> | <b>703,3</b>          | <b>710,9</b>        | <b>91,6</b> | <b>101,1</b>                |

- Realisasi mencapai Rp710,9 T, lebih tinggi dari realisasi belanja K/L.
- Penundaan DAU tidak dilaksanakan dan seluruh dana sudah ditransfer pada bulan Desember 2016.
- Kewajiban terhadap kurang bayar DBH sejak tahun 2010 sd 2015 sudah sebagian diselesaikan, sehingga masih tersisa Rp13,8 T. Apabila ditambahkan dengan penundaan DBH di Tahun 2016 sebesar Rp11,5 T, maka masih tersisa Rp25,3 T pembayaran kurang bayar DBH.
- Dari total sisa tersebut, telah dianggarkan Rp10,9 T pada APBN 2017, sehingga tersisa Rp14,4 T yang belum dianggarkan.



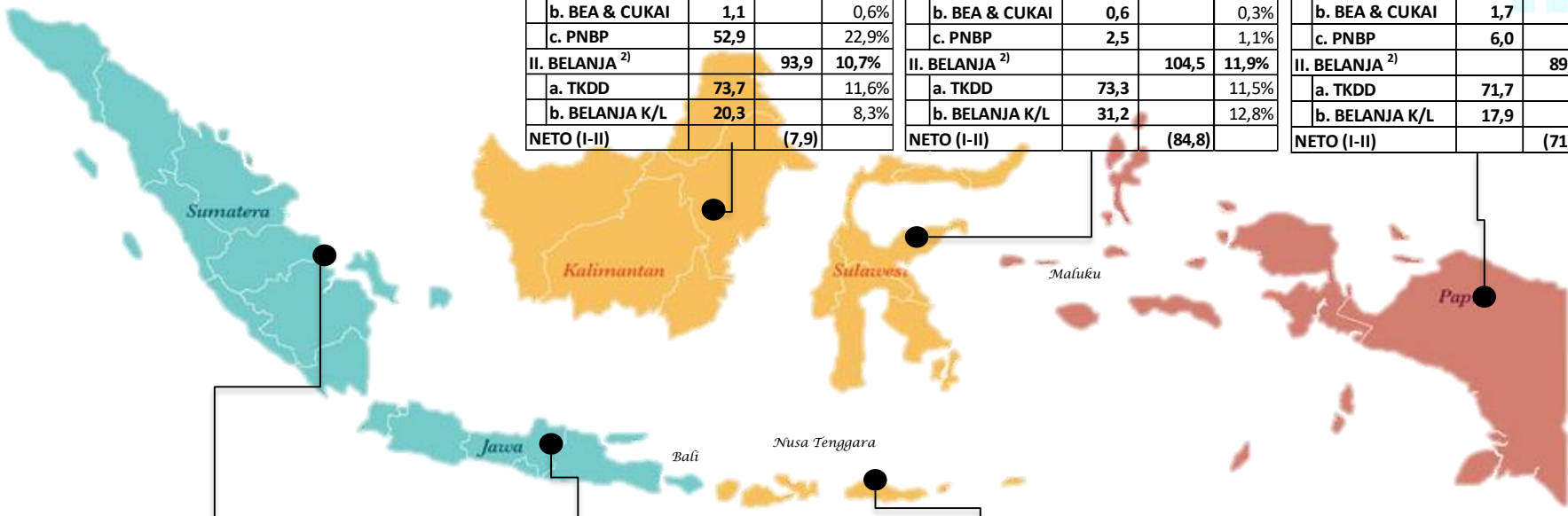
# Ekualisasi Pendapatan dan Belanja Antarwilayah untuk memperkuat pelaksanaan Nawacita ketiga, desentralisasi fiskal dan otonomi daerah, serta memperkokoh eksistensi NKRI.



| PULAU                       | KALIMANTAN |            |
|-----------------------------|------------|------------|
| I. PENDAPATAN <sup>1)</sup> |            | 86,0 6,0%  |
| a. PAJAK                    | 32,0       | 3,1%       |
| b. BEA & CUKAI              | 1,1        | 0,6%       |
| c. PNPB                     | 52,9       | 22,9%      |
| II. BELANJA <sup>2)</sup>   |            | 93,9 10,7% |
| a. TKDD                     | 73,7       | 11,6%      |
| b. BELANJA K/L              | 20,3       | 8,3%       |
| NETO (I-II)                 |            | (7,9)      |

| PULAU                       | SULAWESI |             |
|-----------------------------|----------|-------------|
| I. PENDAPATAN <sup>1)</sup> |          | 19,7 1,4%   |
| a. PAJAK                    | 16,6     | 1,6%        |
| b. BEA & CUKAI              | 0,6      | 0,3%        |
| c. PNPB                     | 2,5      | 1,1%        |
| II. BELANJA <sup>2)</sup>   |          | 104,5 11,9% |
| a. TKDD                     | 73,3     | 11,5%       |
| b. BELANJA K/L              | 31,2     | 12,8%       |
| NETO (I-II)                 |          | (84,8)      |

| PULAU                       | MALUKU & PAPUA |            |
|-----------------------------|----------------|------------|
| I. PENDAPATAN <sup>1)</sup> |                | 18,4 1,3%  |
| a. PAJAK                    | 10,7           | 1,0%       |
| b. BEA & CUKAI              | 1,7            | 1,0%       |
| c. PNPB                     | 6,0            | 2,6%       |
| II. BELANJA <sup>2)</sup>   |                | 89,6 10,2% |
| a. TKDD                     | 71,7           | 11,3%      |
| b. BELANJA K/L              | 17,9           | 7,3%       |
| NETO (I-II)                 |                | (71,3)     |



| PULAU                       | SUMATERA |             |
|-----------------------------|----------|-------------|
| I. PENDAPATAN <sup>1)</sup> |          | 144,1 10,1% |
| a. PAJAK                    | 66,9     | 6,5%        |
| b. BEA & CUKAI              | 6,8      | 3,9%        |
| c. PNPB                     | 70,4     | 30,5%       |
| II. BELANJA <sup>2)</sup>   |          | 232,3 26,4% |
| a. TKDD                     | 176,1    | 27,7%       |
| b. BELANJA K/L              | 56,2     | 23,1%       |
| NETO (I-II)                 |          | (88,2)      |

| PULAU                       | JAWA  |               |
|-----------------------------|-------|---------------|
| I. PENDAPATAN <sup>1)</sup> |       | 1.143,2 80,1% |
| a. PAJAK                    | 884,9 | 86,5%         |
| b. BEA & CUKAI              | 161,6 | 93,2%         |
| c. PNPB                     | 96,6  | 41,9%         |
| II. BELANJA <sup>2)</sup>   |       | 302,8 34,4%   |
| a. TKDD                     | 201,8 | 31,7%         |
| b. BELANJA K/L              | 101,0 | 41,5%         |
| NETO (I-II)                 |       | 840,4         |

| PULAU                       | BALI & NUSRA |           |
|-----------------------------|--------------|-----------|
| I. PENDAPATAN <sup>1)</sup> |              | 15,5 1,1% |
| a. PAJAK                    | 11,7         | 1,1%      |
| b. BEA & CUKAI              | 1,5          | 0,9%      |
| c. PNPB                     | 2,3          | 1,0%      |
| II. BELANJA <sup>2)</sup>   |              | 56,4 6,4% |
| a. TKDD                     | 39,5         | 6,2%      |
| b. BELANJA K/L              | 17,0         | 7,0%      |
| NETO (I-II)                 |              | (40,9)    |

Ket:

- 1) Yang dikumpulkan dari Daerah ke Pusat
  - 2) Belanja yang dikembalikan dari Pusat ke Daerah
- Data dalam triliun rupiah
  - Data adalah rata-rata periode 2014-2016

- Walaupun Wilayah Jawa memberikan kontribusi yang dominan sebesar 80,1% pada pendapatan negara, namun wilayah lain di luar Jawa justru memperoleh alokasi belanja (baik Transfer ke Daerah dan Dana Desa, belanja K/L yang berlokasi di daerah, maupun belanja Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) yang lebih besar.
- Kebijakan ekspansi anggaran di luar Jawa dimaksudkan untuk mendukung akselerasi pembangunan di luar Jawa dalam mempercepat ekualisasi kemajuan antara wilayah Jawa dengan luar Jawa.



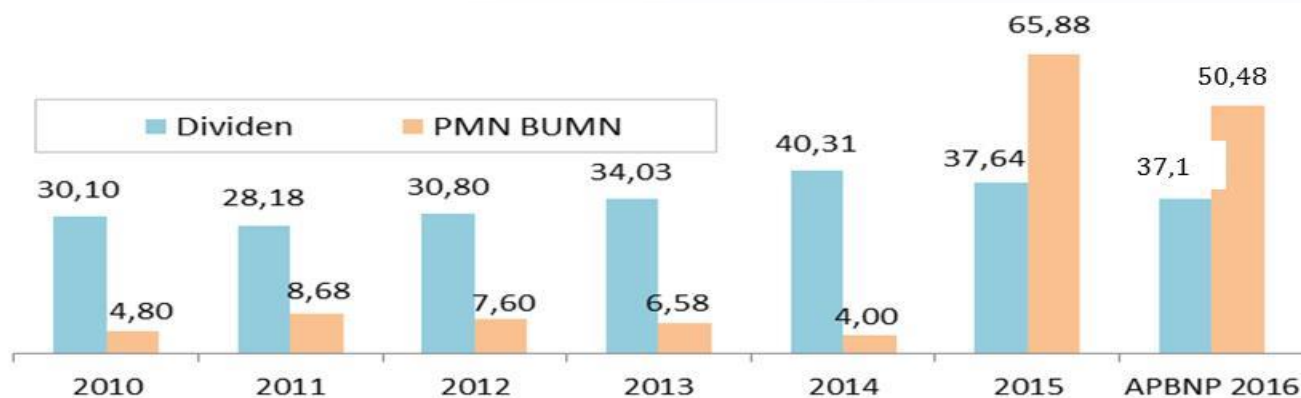
# Realisasi sementara Pembiayaan Anggaran mencapai Rp330,3 T atau 111,3% dari APBNP.



| PEMBIAYAAN ANGGARAN<br>(triliun rupiah)   | 2015         |             | 2016   |                          |                        |             |                                |
|---|--------------|-------------|--------|--------------------------|------------------------|-------------|--------------------------------|
|   | LKPP Audited | % thd APBNP | APBNP  | Outlook<br>(Penghematan) | Realisasi<br>Sementara | % thd APBNP | % thd Outlook<br>(Penghematan) |
| <b>PEMBIAYAAN ANGGARAN (I + II)</b>       | 323,1        | 145,2       | 296,7  | 315,7                    | 330,3                  | 111,3       | 104,6                          |
| <i>% Pembiayaan Anggaran terhadap PDB</i> | 2,80         |             | 2,35   | 2,50                     | 2,64                   |             |                                |
| <b>I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI</b>         | 307,9        | 126,9       | 299,3  | 319,1                    | 344,9                  | 115,3       | 108,1                          |
| 1. Perbankan dalam negeri                 | 4,9          | 101,4       | 25,4   | 25,3                     | 25,9                   | 102,1       | 102,2                          |
| 2. Non-perbankan dalam negeri             | 303,0        | 127,5       | 273,9  | 293,7                    | 319,0                  | 116,5       | 108,6                          |
| a.l. - Surat Berharga Negara (neto)       | 362,3        | 121,7       | 364,9  | 382,4                    | 407,3                  | 111,6       | 106,5                          |
| <b>II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto)</b>  | 15,3         | (76,2)      | (2,5)  | (3,4)                    | (14,6)                 | -           | -                              |
| 1. Penarikan Pinjaman LN (bruto)          | 83,8         | 172,3       | 73,0   | 70,9                     | 59,0                   | 80,8        | 83,1                           |
| a. Pinjaman Program                       | 55,1         | 734,5       | 35,8   | 35,2                     | 35,3                   | 98,7        | 100,2                          |
| b. Pinjaman Proyek                        | 28,7         | 69,8        | 37,2   | 35,7                     | 23,6                   | 63,6        | 66,2                           |
| 2. Penerusan Pinjaman (SLA)               | (2,6)        | 57,6        | (5,8)  | (5,6)                    | (4,8)                  | 82,8        | 86,2                           |
| 3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN      | (66,0)       | 102,8       | (69,7) | (68,8)                   | (68,7)                 | 98,7        | 99,9                           |

- Pembiayaan anggaran (termasuk utang) dilakukan secara hati-hati, dan dengan efisiensi maksimal.
- Konsisten menjaga defisit dibawah 3% dan rasio utang yang terjaga rendah.
- PMN tahun 2016 dilaksanakan seluruhnya.
- PMN kepada BUMN dalam dua tahun terakhir sekitar Rp116,4 triliun, jauh lebih besar dari penerimaan dividen BUMN sebesar Rp74,7 triliun.
- Dengan demikian, BUMN menjadi motor penggerak percepatan pembangunan melalui *leverage* yang lebih tinggi.

**Grafik Perbandingan PMN dan Dividen BUMN**





# KESIMPULAN

1. APBN terus dijaga menjadi instrumen pembangunan yang kredibel, efektif dan efisien.
2. Proyeksi penerimaan optimis namun tetap realistis, didukung dengan reformasi perpajakan yang sangat penting dan mendesak.
3. Kualitas belanja negara terus diperbaiki: perencanaan anggaran yang akurat, efisiensi anggaran, kemampuan penyerapan dan pelaksanaan yang efektif. Terus dilakukan evaluasi efektivitas belanja negara untuk pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan.
4. Transfer ke daerah konsisten dengan pendelegasian kewenangan dan perlu terus dimonitor dan dievaluasi efektivitas perbaikan pelayanan masyarakat.
5. Pembiayaan dilakukan secara efisien dan optimal. Menggunakan peranan negara secara maksimal namun tetap hati-hati dalam menunjang program pembangunan.
6. Reformasi APBN dilakukan bersama dengan reformasi ekonomi lainnya untuk menciptakan kesempatan kerja, mempercepat pengurangan kemiskinan dan kesenjangan dan menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif.



**TERIMA KASIH**



# Realisasi Belanja K/L 2015 - 2016

Triliun Rupiah



| No.                         | KEMENTERIAN<br>NEGARA/LEMBAGA | 2015         |              |                | 2016           |                         |                        |                         |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
|                             |                               | APBNP        | LKPP         | % thd<br>APBNP | Pagu<br>Inpres | % thd<br>Pagu<br>Inpres | Realisasi<br>Sementara | % thd<br>Pagu<br>Inpres |
| 1                           | KEMENHAN                      | 102,3        | 101,4        | 99,1           | 100,8          | 87,9                    | 91,9                   | 91,2                    |
| 2                           | KEMEN PU PERA                 | 118,5        | 109,5        | 92,3           | 90,1           | 90,1                    | 84,1                   | 93,3                    |
| 3                           | POLRI                         | 57,1         | 62,0         | 108,5          | 76,3           | 100,2                   | 78,8                   | 103,3                   |
| 4                           | KEMENKES                      | 51,3         | 48,9         | 95,3           | 57,2           | 95,2                    | 56,3                   | 98,5                    |
| 5                           | KEMENAG                       | 60,3         | 53,8         | 89,3           | 54,8           | 95,3                    | 53,9                   | 98,4                    |
| 6                           | KEMENDIKBUD                   | 53,3         | 48,9         | 91,7           | 39,7           | 96,5                    | 39,6                   | 99,8                    |
| 7                           | KEMENHUB                      | 65,0         | 47,1         | 72,5           | 38,2           | 82,3                    | 32,7                   | 85,7                    |
| 8                           | KEMENRISTEK DIKTI             | 43,6         | 39,1         | 89,7           | 39,2           | 86,6                    | 35,1                   | 89,7                    |
| 9                           | KEMENKEU                      | 25,7         | 28,2         | 110,0          | 34,5           | 101,7                   | 37,3                   | 107,9                   |
| 10                          | KEMENTAN                      | 32,8         | 28,7         | 87,4           | 21,7           | 96,2                    | 21,7                   | 100,0                   |
| 11                          | KEMENSOS                      | 22,4         | 21,1         | 94,3           | 12,2           | 100,5                   | 12,6                   | 103,7                   |
| 12                          | KEMENHUKHAM                   | 11,2         | 9,3          | 82,8           | 10,7           | 98,4                    | 10,9                   | 101,5                   |
| 13                          | KKP                           | 10,6         | 9,3          | 87,5           | 7,5            | 83,1                    | 6,6                    | 87,3                    |
| 14                          | MA                            | 8,6          | 7,9          | 92,7           | 8,6            | 95,6                    | 8,5                    | 98,6                    |
| 15                          | KEMEN DESA, PDT, TRANS        | 9,0          | 6,9          | 76,6           | 6,5            | 88,9                    | 6,0                    | 92,8                    |
| 15 K/L dengan Pagu Terbesar |                               | 671,6        | 622,0        | 92,6           | 598,0          | 92,9                    | 576,0                  | 96,3                    |
| K/L Lainnya                 |                               | 123,9        | 110,1        | 88,9           | 105,1          | 93,3                    | 101,6                  | 96,6                    |
| <b>JUMLAH</b>               |                               | <b>795,5</b> | <b>732,1</b> | <b>92,0</b>    | <b>703,1</b>   | <b>93,0</b>             | <b>677,6</b>           | <b>96,4</b>             |



# Realisasi sementara belanja K/L 2016 mencapai Rp677,6 triliun atau 100,8% thd Pagu Outlook Inpres (APBNP minus Inpres Penghematan dan penghematan alamiah)



Triliun Rupiah

| No.                         | KEMENTERIAN<br>NEGARA/LEMBAGA | 2016         |                |                        |                |                         |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------|----------------|------------------------|----------------|-------------------------|
|                             |                               | APBNP        | Pagu<br>Inpres | Realisasi<br>Sementara | % thd<br>APBNP | % thd<br>Pagu<br>Inpres |
| 1                           | KEMENHAN                      | 108,7        | 100,8          | 91,9                   | 84,5           | 91,2                    |
| 2                           | KEMEN PU PERA                 | 97,1         | 90,1           | 84,1                   | 86,6           | 93,3                    |
| 3                           | POLRI                         | 79,3         | 76,3           | 78,8                   | 99,5           | 103,3                   |
| 4                           | KEMENKES                      | 62,7         | 57,2           | 56,3                   | 89,8           | 98,5                    |
| 5                           | KEMENAG                       | 56,2         | 54,8           | 53,9                   | 95,9           | 98,4                    |
| 6                           | KEMENDIKBUD                   | 43,6         | 39,7           | 39,6                   | 90,8           | 99,8                    |
| 7                           | KEMENHUB                      | 42,9         | 38,2           | 32,7                   | 76,2           | 85,7                    |
| 8                           | KEMENRISTEK DIKTI             | 40,6         | 39,2           | 35,1                   | 86,7           | 89,7                    |
| 9                           | KEMENKEU                      | 38,1         | 34,5           | 37,3                   | 97,9           | 107,9                   |
| 10                          | KEMENTAN                      | 27,6         | 21,7           | 21,7                   | 78,5           | 100,0                   |
| 11                          | KEMENSOS                      | 13,1         | 12,2           | 12,6                   | 96,2           | 103,7                   |
| 12                          | KEMENHUKHAM                   | 11,3         | 10,7           | 10,9                   | 96,6           | 101,5                   |
| 13                          | KKP                           | 10,6         | 7,5            | 6,6                    | 62,0           | 87,3                    |
| 14                          | MA                            | 8,8          | 8,6            | 8,5                    | 96,5           | 98,6                    |
| 15                          | KEMEN DESA, PDT, TRANS        | 8,6          | 6,5            | 6,0                    | 70,3           | 92,8                    |
| 15 K/L dengan Pagu Terbesar |                               | 649,1        | 598,0          | 576,0                  | 88,7           | 96,3                    |
| K/L Lainnya                 |                               | 118,7        | 105,1          | 101,6                  | 85,6           | 96,6                    |
| <b>JUMLAH</b>               |                               | <b>767,8</b> | <b>703,1</b>   | <b>677,6</b>           | <b>88,3</b>    | <b>96,4</b>             |

Catatan:

- Pagu Inpres hanya memperhitungkan Inpres Penghematan
- Apabila memperhitungkan estimasi penghematan alamiah sebesar Rp31,1 triliun, maka outlook menjadi sebesar Rp672,0 triliun → persentase Realisasi Sementara terhadap outlook menjadi sebesar 100,8 persen



# Pembiayaan nonutang diarahkan untuk mendorong pembangunan infrastruktur, melalui pemberian PMN kepada BUMN, serta BLU LMAN.

| Uraian   | 2015          |                  | 2016          |                     |              |                              |
|--|---------------|------------------|---------------|---------------------|--------------|------------------------------|
|  | LKPP          | % LKPP thd APBNP | APBNP         | Realisasi Sementara | %thd APBNP   | %thd Outlook (Inpres 8/2016) |
| <b>A. Perbankan Dalam Negeri</b>   | <b>4,9</b>    | <b>101,4</b>     | <b>25,4</b>   | <b>25,9</b>         | <b>102,1</b> | <b>102,2</b>                 |
| 1. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman                    | 4,9           | 101,4            | 6,3           | 6,9                 | 108,4        | 108,6                        |
| 2. SAL   | -             | -                | 19,0          | 19,0                | 100,0        | 100,0                        |
| <b>B. Non Perbankan Dalam Negeri</b>                                     | <b>(60,1)</b> | <b>97,4</b>      | <b>(94,4)</b> | <b>(89,2)</b>       | <b>94,5</b>  | <b>97,1</b>                  |
| 1. Hasil Pengelolaan Aset  | 0,3           | 97,6             | 0,3           | 0,6                 | 169,3        | 169,3                        |
| 2. Dana Investasi Pemerintah   | (59,7)        | 101,4            | (89,0)        | (84,1)              | 94,5         | 94,5                         |
| a. Penerimaan Kembali Investasi  | 19,1          | 100,0            | 1,4           | 1,4                 | 100,0        | 100,0                        |
| b. Penyertaan Modal Negara   | (71,9)        | 102,2            | (65,2)        | (65,2)              | 100,1        | 100,0                        |
| i. PMN kepada BUMN   | (64,5)        | 99,5             | (50,5)        | (50,5)              | 100,0        | 100,0                        |
| ii. PMN kepada Organisasi/ Lembaga Keuangan Internasional                | (0,3)         | 110,4            | (3,8)         | (3,8)               | 101,2        | 100,1                        |
| iii. PMN Lainnya   | (7,1)         | 136,1            | (10,9)        | (10,9)              | 100,0        | 100,0                        |
| c. Dana Bergulir   | (5,4)         | 87,7             | (9,2)         | (4,3)               | 46,6         | 46,6                         |
| d. Pembiayaan Investasi dalam rangka Pembentukan BLU Manajemen Aset      | (1,5)         | 100,0            | (16,0)        | (16,0)              | 100,0        | 100,0                        |
| 3. Kewajiban Penjaminan  | -             | -                | (0,7)         | (0,7)               | 100,0        | 100,0                        |
| 4. Dana Antisipasi untuk PT Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo Jaya | (0,8)         | 98,9             | (0,1)         | 0,0                 | -            | 0,0                          |
| 5. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional                                 | -             | -                | (5,0)         | (5,0)               | 100,0        | 200,0                        |
| <b>Total</b>   | <b>(55,2)</b> | <b>97,1</b>      | <b>(69,0)</b> | <b>(63,3)</b>       | <b>91,7</b>  | <b>95,1</b>                  |

- Lebih rendahnya realisasi sementara non perbankan dalam negeri dibandingkan APBNP 2016 disebabkan tidak dicairkannya sebagian alokasi dana bergulir PPDPP.
- Di sisi lain, realisasi sementara PMN pada tahun 2016 mencapai 100,1 persen dari APBNP tahun 2016 disebabkan oleh lebih tingginya kurs saat pencairan PMN pada AIIB.





# Pembiayaan utang dilaksanakan sesuai prinsip kehati-hatian (*prudent*), serta mempertimbangkan efisiensi biaya dan risiko yang terkendali.

| Uraian   | 2015         |                  | 2016         |                         |                     |              |                              |
|--|--------------|------------------|--------------|-------------------------|---------------------|--------------|------------------------------|
|  | LKPP         | % LKPP thd APBNP | APBNP        | Outlook (Inpres 8/2016) | Realisasi Sementara | %thd APBNP   | %thd Outlook (Inpres 8/2016) |
| <b>A. Pinjaman Luar Negeri (Neto)</b>            | 15,3         | (76,2)           | (2,5)        | (3,4)                   | (14,6)              | 577,5        | 426,3                        |
| <b>1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)</b> | 83,8         | 172,3            | 73,0         | 70,9                    | 59,0                | 80,8         | 83,1                         |
| a. Pinjaman Program                              | 55,1         | 734,5            | 35,8         | 35,2                    | 35,3                | 98,7         | 100,2                        |
| b. Pinjaman Proyek                               | 28,7         | 69,8             | 37,2         | 35,7                    | 23,6                | 63,6         | 66,2                         |
| 1). Pinjaman Proyek Pemerintah Pusat             | 26,2         | 71,3             | 31,4         | 30,1                    | 18,8                | 60,0         | 62,5                         |
| 2). Penerimaan Penerusan Pinjaman                | 2,6          | 57,6             | 5,8          | 5,6                     | 4,8                 | 82,8         | 86,2                         |
| <b>2. Penerusan Pinjaman</b>                     | (2,6)        | 57,6             | (5,8)        | (5,6)                   | (4,8)               | 82,8         | 86,2                         |
| <b>3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN</b>      | (66,0)       | 102,8            | (69,7)       | (68,8)                  | (68,7)              | 98,7         | 99,9                         |
| <b>B. Surat Berharga Negara (neto)</b>           | 362,3        | 121,7            | 364,9        | 382,4                   | 407,3               | 111,6        | 106,5                        |
| <b>C. Pinjaman Dalam Negeri (neto)</b>           | 0,8          | 49,2             | 3,4          | 3,3                     | 1,0                 | 28,7         | 29,9                         |
| <b>Total</b>                                     | <b>378,3</b> | <b>135,4</b>     | <b>365,7</b> | <b>382,2</b>            | <b>393,6</b>        | <b>107,6</b> | <b>103,0</b>                 |

- Realisasi sementara pembiayaan utang lebih tinggi dari APBNP 2016 disebabkan adanya antisipasi melebarnya defisit anggaran.
- Pembiayaan utang terutama bersumber dari penerbitan SBN.
- Realisasi sementara pinjaman luar negeri lebih rendah dari APBNP 2016 disebabkan oleh rendahnya kinerja pinjaman proyek (terutama terkendala oleh pembebasan lahan).



# Realisasi sementara PMN mencapai 100 persen, diharapkan BUMN dapat berperan dalam pembangunan infrastruktur.



Triliun Rupiah

| Keterangan   | 2015          |              | 2016          |                         |                     |              |                               |
|--|---------------|--------------|---------------|-------------------------|---------------------|--------------|-------------------------------|
|  | LKPP Audited  | % thd APBNP  | APBNP         | Outlook (Inpres 8/2016) | Realisasi Sementara | % thd APBNP  | % thd Outlook (Inpres 8/2016) |
| <b>A. BUMN</b>   | (64,9)        | 100,0        | (50,5)        | (50,5)                  | (50,5)              | 100,0        | 100,0                         |
| - PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF)                      | (1,0)         | 100,0        | (1,0)         | (1,0)                   | (1,0)               | 100,0        | 100,0                         |
| - PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI)                       | (20,4)        | 100,0        | (4,2)         | (4,2)                   | (4,2)               | 100,0        | 100,0                         |
| - PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia                        | (1,5)         | 100,0        | (1,0)         | (1,0)                   | (1,0)               | 100,0        | 100,0                         |
| - Perum Bulog  | (3,0)         | 100,0        | (2,0)         | (2,0)                   | (2,0)               | 100,0        | 100,0                         |
| - PT Pertani   | (0,5)         | 100,0        | (0,5)         | (0,5)                   | (0,5)               | 100,0        | 100,0                         |
| - PT Perikanan Nusantara (konversi seluruhnya)                 | (0,20)        | 100,0        | (0,03)        | (0,03)                  | (0,03)              | 100,0        | 100,0                         |
| - PT Rajawali Nusantara Indonesia (konversi seluruhnya)        | -             | -            | (0,7)         | (0,7)                   | (0,7)               | 97,5         | 97,5                          |
| - PT Angkasa Pura II   | (2,0)         | 100,0        | (2,0)         | (2,0)                   | (2,0)               | 100,0        | 100,0                         |
| - PT Pelni (konversi seluruhnya)                               | (0,5)         | 100,0        | (0,6)         | (0,6)                   | (0,6)               | 100,0        | 100,0                         |
| - PT Barata Indonesia  | -             | -            | (0,5)         | (0,5)                   | (0,5)               | 100,0        | 100,0                         |
| - PT Utama Karya   | (3,6)         | 100,0        | (2,0)         | (2,0)                   | (2,0)               | 100,0        | 100,0                         |
| - PT Wijaya Karya  | -             | -            | (4,0)         | (4,0)                   | (4,0)               | 100,0        | 100,0                         |
| - PT Pembangunan Perumahan                                     | -             | -            | (2,3)         | (2,3)                   | (2,2)               | 100,0        | 100,0                         |
| - Perum Perumnas (Tunai)                                       | (1,0)         | 100,0        | (0,3)         | (0,3)                   | (0,3)               | 100,0        | 100,0                         |
| - Perum Perumnas (konversi)                                    | -             | -            | (0,2)         | (0,2)                   | (0,2)               | 100,0        | 100,0                         |
| - PT Jasa Marga  | -             | -            | (1,3)         | (1,3)                   | (1,2)               | 100,0        | 100,0                         |
| - PT Industri Kereta Api                                       | (2,0)         | 100,0        | (1,0)         | (1,0)                   | (1,0)               | 100,0        | 100,0                         |
| - PT Krakatau Steel (Tunai)                                    | -             | -            | (1,5)         | (1,5)                   | (1,5)               | 100,0        | 100,0                         |
| - PT Krakatau Steel (konversi)                                 | -             | -            | (1,0)         | (1,0)                   | (1,0)               | 100,0        | 100,0                         |
| - PT Perusahaan Listrik Negara                                 | (5,0)         | 100,0        | (23,6)        | (23,6)                  | (23,6)              | 100,0        | 100,0                         |
| - PT Asuransi Kredit Indonesia                                 | (1,0)         | 100,0        | (0,5)         | (0,5)                   | (0,5)               | 100,0        | 100,0                         |
| - Perum Jamkrindo  | -             | -            | (0,5)         | (0,5)                   | (0,5)               | 100,0        | 100,0                         |
| - PT Amarta Karya (konversi seluruhnya)                        | -             | -            | (0,03)        | (0,03)                  | (0,03)              | 100,0        | 100,0                         |
| - Lainnya  | (23,26)       | 100,0        |               |                         |                     |              |                               |
| <b>B. Organisasi/LKI</b>                                       | (0,3)         | 108,0        | (3,8)         | (3,8)                   | (3,8)               | 101,2        | 100,1                         |
| - International Fund for Agricultural Development (IFAD)       | (0,05)        | 108,0        | (0,04)        | (0,04)                  | (0,04)              | 100,0        | 98,9                          |
| - International Finance Corporation (IFC)                      | -             | -            | (0,0002)      | (0,0002)                | -                   | -            | -                             |
| - Islamic Development Bank (IDB)                               | -             | -            | (0,1)         | (0,08)                  | (0,1)               | 100,0        | 98,9                          |
| - International Development Association (IDA)                  | (0,02)        | 108,0        | (0,04)        | (0,04)                  | (0,04)              | 100,0        | 98,9                          |
| - Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)                  | -             | -            | (3,6)         | (3,6698)                | (3,7)               | 101,3        | 100,1                         |
| - International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) | (0,2)         | 108,0        |               |                         |                     |              |                               |
| <b>C. Lainnya</b>  | (5,2)         | 100,0        | (10,9)        | (10,9)                  | (10,9)              | 100,0        | 100,0                         |
| - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)                   | (1,0)         | 100,0        | (4,0)         | (4,0)                   | (4,0)               | 100,0        | 100,0                         |
| - BPJS Kesehatan   | (3,5)         | 100,0        | (6,8)         | (6,8)                   | (6,8)               | 100,0        | 100,0                         |
| - PT Perkebunan Nusantara I (konversi seluruhnya)              | -             | -            | (0,03)        | (0,03)                  | (0,03)              | 100,0        | 100,0                         |
| - PT Perkebunan Nusantara VIII (konversi seluruhnya)           | -             | -            | (0,03)        | (0,03)                  | (0,03)              | 100,0        | 100,0                         |
| - Bank Indonesia   | (0,8)         | 100,0        |               |                         |                     |              |                               |
| <b>Total PMN</b>   | <b>(70,4)</b> | <b>100,0</b> | <b>(65,2)</b> | <b>(65,2)</b>           | <b>(65,2)</b>       | <b>100,0</b> | <b>100,0</b>                  |